

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Adizza Djasmine Setiawan

No. Mahasiswa: 20312586

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Adizza Djasmine Setiawan

No. Mahasiswa: 20312586

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Desember 2023



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Adizza Djasmine Setiawan

No. Mahasiswa: 20312586

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Desember 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AR' with a stylized flourish.

(Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.)

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS Al-Insyirah: 6-8)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(QS Yasin : 40)

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”

(Mae West)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta saya atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tanpa henti yang mereka berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Mereka adalah alasan saya dapat menulis skripsi ini, dari huruf pertama hingga huruf terakhir dalam skripsi saya persembahkan dan dedikasikan untuk orang tua saya.

Saya juga mempersembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang telah berhasil bertahan hingga titik ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat ini dari kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata-1 pada program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mendapat berbagai bantuan, bimbingan, dan dukungan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya dan petunjuk serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi panutan dalam perjalanan penulisan ini.
3. Kedua orang tua Bapak Andi Setiawan dan Mamah Samaniah Abdullah yang selalu memberikan dukungan yang tidak terhingga, kasih sayang dan doa untuk penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih sebesar-besarnya

atas setiap perjuangan dan doa Bapak dan Mamah yang telah diberikan kepada penulis.

4. Kedua adik saya Revana Khaira Setiawan dan Jemal Athallah Setiawan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu menjadi contoh pribadi yang baik untuk mereka.
5. Untuk Nenek Abang dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis baik perjuangan sebelum kuliah maupun ketika menyelesaikan studi ini.
6. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta saran yang bermanfaat kepada penulis dari awal skripsi ini dibuat hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan segala ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
10. Untuk Israwati Mirad dan Khoirunnisa yang selalu menjadi sahabat yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.

11. Untuk Oif Alifia Putentra yang telah menjadi teman berprogres dalam mengerjakan skripsi.
12. Untuk tim PKM *Healbag*, yaitu Dhea, Shila, Havis dan Isnanda yang telah menjadi teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi tidak hanya pada saat PKM, tetapi juga selama masa perkuliahan.
13. Untuk rekan-rekan pengurus KOPMA FBE UII dan Methamorfosa 27 yang telah memberikan banyak pengalaman serta kebersamaan selama penulis berada di perantauan.
14. Untuk teman-teman Dixsone yang selalu menjadi teman-teman yang terbaik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman program studi Akuntansi FBE UII Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
16. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan memberikan dukungan baik materi maupun non materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga berkah dan kasih sayang Allah SWT senantiasa mengalir kepada mereka yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik serta saran untuk perbaikan sangat diharapkan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak.

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan dalam Pemerintahan	11
2.1.2 Signalling Theory	13
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	15
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	19
2.1.5 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Hipotesis Penelitian	24
2.3.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27

2.4 Kerangka Konseptual	29
BAB III.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Populasi dan Sampel.....	30
3.3 Variabel Penelitian	31
3.3.1 Variabel Dependen	31
3.3.2 Variabel Independen	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Metode Analisis Data	37
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	38
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	40
3.5.4 Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV	44
4.1 Hasil Statistik Deskriptif	44
4.1.1 Variabel Rasio Kemandirian Daerah (RKD).....	45
4.1.2 Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	46
4.1.3 Variabel Jumlah Penduduk (JP).....	47
4.1.4 Variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (TP)	48
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	48
4.2.1 Hasil Uji Normalitas	49
4.2.2 Hasil Uji Autokorelasi.....	50
4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
4.2.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda	55
4.4 Pengujian Hipotesis	58
4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58
4.4.2 Hasil Uji <i>Fit Model</i> (Uji F).....	59
4.4.3 Hasil Uji t.....	61
4.5 Pembahasan.....	63
4.5.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD	65

4.5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD.....	68
4.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD	71
4.5.4 Analisis Sebelum Masa Pandemi <i>Covid-19</i> dan Ketika Pandemi <i>Covid-19</i>	74
BAB V	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN 1	89
LAMPIRAN 2	92
LAMPIRAN 3	93
LAMPIRAN 4	94
LAMPIRAN 5	95
LAMPIRAN 6	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian.....	29
Gambar 4.1 Hasil uji normal <i>probability plot</i>	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	46
Tabel 4.3 Kategori IPM	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.5 Hasil Tabel DW	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji t.....	62
Tabel 4.14 Hasil Uji t (tahun 2018-2019).....	75
Tabel 4.15 Hasil Uji t (tahun 2020-2021).....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Tabel *Checklist* Kriteria Elemen Pengungkapan Wajib berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
- Lampiran 2** : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran 3** : Rasio Kemandirian Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021
- Lampiran 4** : Indeks Pembangunan Manusia Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021
- Lampiran 5** : Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021
- Lampiran 6** : Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio kemandirian daerah, indeks Pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 22.0. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 68 LKPD yang telah memenuhi kriteria. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara periode 2018-2021. Serta penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara periode 2018-2021 adalah sebesar 52,8022%.

Kata Kunci: Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda, Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional independence ratio, human development index and population on the level of disclosure of local government financial statements Districts/Cities in Southeast Sulawesi. The population in this study is local government financial statements Districts/Cities in Southeast Sulawesi for the 2018-2021 period. The sampling technique used is purposive sampling with the data analysis model used is multiple regression analysis using SPSS 22.0. The number of samples used was 68 local government financial statements that had met the criteria. The results obtained in this study show that partially, the ratio of regional independence, human development index and population have no influence on the level of disclosure of local government financial statements Districts/Cities in Southeast Sulawesi for the 2018-2021 period. And research also shows that the average disclosure rate of local government financial statements Districts/Cities in Southeast Sulawesi for the 2018-2021 period is 52.8022%.

Keywords: *Disclosure of Local Government Financial Statements, Regional Independence Ratio, Human Development Index, Population.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya sektor publik dan peranannya di Indonesia menjadi salah satu pengaruh yang menyebabkan berkembangnya praktik akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik menjadi pedoman bagi entitas-entitas yang bergerak dalam rana sektor publik, salah satunya adalah pemerintah daerah (Sari, 2016). Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah. Mayoritas dana tersebut berasal dari masyarakat, sehingga pemerintah sebagai pengelola dana wajib bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola dana masyarakat (Kurniaty, 2023). Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawabannya menggunakan akuntansi sektor publik sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah (Naopal et al, 2017).

Salah satu komponen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan adalah pengungkapan pada laporan keuangan (Wulandari & Sulardi, 2018). Untuk membuat keputusan yang akurat, pengungkapan informasi penting dan relevan terhadap proses pemungutan keputusan harus tercakup dalam laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu konsep pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan dengan lengkap (*full disclosure*) melalui laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, walaupun pengungkapan lengkap telah diwajibkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi kriteria pengungkapan secara penuh yang telah ditetapkan di SAP. Pada tahun anggaran 2017-2019 tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia masih cukup rendah, dengan rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 58,35% menunjukkan pemerintah daerah di Indonesia dalam mengungkapkan informasi wajib masih tergolong dalam kategori belum patuh. Bahkan tingkat pengungkapan tertinggi dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur hanya menunjukkan nilai sebesar 69% untuk periode tahun 2017 (Febriani & Harahap, 2021).

Tingkat pengungkapan LKPD untuk setiap provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor. Untuk tahun anggaran 2018 contohnya, tingkat pengungkapan tertinggi diraih oleh Provinsi Sumatera Barat dengan opini WTP dan Kabupaten Grobogan dengan opini WTP dengan persentase sebesar 65,22% dan tingkat pengungkapan terendah sebesar 30,43% yang diraih oleh Kabupaten Keerom dengan opini WTP (Ayyuuby, 2021). Kontras dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2016) menunjukkan hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011-2013 yaitu sebesar 72% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, ukuran pemerintah daerah, dan kinerja pemerintah

daerah. Persentase ini tentu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian sebelum dengan persentase tertinggi hanya mencapai 65,22% saja. Berdasarkan hasil tersebut terbukti bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang layak untuk dikaji dan diteliti pengaruhnya.

Rasio kemandirian daerah merupakan salah satu faktor yang dianggap dapat memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat 10 provinsi yang masih berstatus belum mandiri dan masih bergantung pada transfer pusat di tahun 2020, dimana salah satunya adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebesar 0,2466 (CNN Indonesia, 2021). Menurut Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menjelaskan bahwa untuk tahun 2018, PAD daerah Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh pajak kendaraan sebesar Rp. 700 miliar. Sedangkan untuk sumber PAD dari potensi lainnya belum dalam dimaksimalkan hasilnya (BPK Sultra, 2019). Berdasarkan LKPD untuk tahun 2018-2021 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata menunjukkan tren peningkatan PAD setiap tahunnya yang diiringi dengan peningkatan pada komponen pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun komponen pendapatan transfer masih mendominasi total komponen pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga walaupun terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah, provinsi Sulawesi Tenggara masih belum dapat membiayai pemerintahannya dengan kekayaan daerahnya sendiri.

Penelitian mengenai pengaruh dari rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan LKPD sejauh ini masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Pada penelitian yang dilakukan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Gorontalo menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan di provinsi Gorontalo tahun 2018-2020 (Hiola & Harun, 2021). Sedangkan pada penelitian terbaru menunjukkan hasil tingkat pengungkapan LKPD pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tidak dipengaruhi oleh rasio kemandirian daerah (Wardani & Ariani, 2022). Melihat kondisi Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tenggara yang masih belum mandiri serta inkonsistensi pada hasil pengaruh variabel rasio kemandirian daerah membuat peneliti tertarik untuk menggunakan variabel rasio kemandirian daerah pada penelitian ini.

Pengungkapan laporan keuangan daerah dapat juga dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian ini menjelaskan tingkat pembangunan masyarakat yang meningkat menyebabkan meningkatnya kesadaran dari masyarakat terhadap program dan kinerja dari pemerintah daerah sehingga menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui pengungkapan pada laporan keuangan.

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Begitupun pemerintah

daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tenggara yang selama beberapa tahun belakang gencar melaksanakan program untuk meningkatkan IPM daerahnya masing-masing. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah daerah Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023, program yang telah dilakukan yaitu meliputi Sultra Cerdas, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Sehat, dan perbaikan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata IPM provinsi Sulawesi Tenggara yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Bahkan menurut Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Wa Zalima pada tahun 2022 Sulawesi Tenggara mencatat peningkatan sebesar 0,57 dibanding tahun sebelumnya (Eggy, 2022). Walaupun begitu apabila dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia dari tahun 2018-2022, IPM di provinsi Sulawesi Tenggara masih selalu berada dibawah rata-rata dengan selisih berkisar 1 - 0,5 poin. Meninjau variabel indeks pembangunan manusia yang masih cukup jarang dikaji pengaruhnya terhadap pengungkapan LKPD serta kondisi tingkat IPM di Sulawesi Tenggara maka peneliti berpendapat variabel ini akan cocok digunakan pada penelitian ini.

Selain Indeks Pembangunan Manusia, faktor lainnya yang dianggap dapat memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah (LKPD) adalah jumlah penduduk atau populasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Sultra, jumlah penduduk di provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 2,653,654 jiwa pada tahun 2018, dengan pertumbuhan sekitar 1,93%. Pada tahun 2019 jumlah penduduknya 2,704,737 dengan pertumbuhan 1,89%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan 1,85% dengan jumlah

penduduk 2,755,589, namun mengalami penurunan menjadi 2,659,156 pada 2021 atau turun sebesar -3,63%. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada tingkat ke-24 menurut data BPS pada tahun 2020 berdasarkan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dimana posisi ini menunjukkan bahwa jumlah dan kepadatan penduduk di Sulawesi Tenggara tidak begitu tinggi. Terdapat 5 wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan 5 wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna (HaloSultra.com, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan di provinsi Jawa Barat periode 2014-2015 menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Naopal et al, 2017). Namun pada penelitian yang dilakukan di Sulawesi Selatan menunjukkan LKPD Kabupaten/Kota dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan pelayanan publik juga meningkat sehingga pemerintah harus mengungkapkan informasi lebih banyak di LKPD (Rahim et al, 2020). Selain karena hasil pengujian variabel yang masih tergolong inkonsisten, variabel jumlah penduduk layak untuk diuji pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan LKPD di provinsi Sulawesi Tenggara karena letak Sulawesi Tenggara berada di posisi geografis yang berdekatan dengan Sulawesi Selatan yang berdasarkan penelitian jumlah penduduknya memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD sehingga memiliki potensi memiliki hasil yang serupa.

Berangkat dari beberapa alasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti menjadikan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai objek penelitian karena ada banyaknya masalah yang berkaitan dengan rasio kemandirian daerah, IPM dan jumlah penduduk serta kompleksitas di daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami & Sulardi (2019) yang menguji pengaruh dari populasi, indeks pembangunan manusia (IPM), opini audit, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Perbedaannya yaitu terletak pada tidak digunakannya variabel independen opini audit pada penelitian ini. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian ini dilakukan untuk LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018-2021, karena adanya kondisi pandemi Covid-19 pada periode tahun tersebut. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin menguji pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah rasio kemandirian daerah memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah indeks pembangunan manusia memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah jumlah penduduk memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab dan membuktikan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna

Berdasarkan isi pembahasan yang tertuang pada skripsi ini diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi pada pengembangan pada bidang akuntansi terutama akuntansi pemerintahan

dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian bagi akademisi, diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber literatur dan bahan dalam pengembangan penelitian selanjutnya untuk topik yang serupa. Serta bagi pemerintah, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama yang berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan daerah.

2. Bagi Penulis

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, khususnya pengetahuan mengenai pengaruh dari rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, terutama terkait dengan judul yang penulis telah pilih.

1.5 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini sistematika penelitian akan terdiri atas 5 bagian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka akan dijabarkan mengenai landasan teori dari penelitian, beberapa jurnal penelitian terdahulu dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan, bagaimana metode pengumpulan datanya, serta teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB 4 DATA DAN PEMBAHASAN

Data dan Pembahasan secara garis besar akan menjelaskan hasil olahan data dan deskripsi dari data penelitian ini. Pada bagian ini akan membahas dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian ini berdasarkan data yang telah diolah.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan dalam Pemerintahan

Teori Agensi merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan berdasarkan kontrak antara dua belah pihak yang berkepentingan yang disebut prinsipal (*principle*) sebagai pihak yang memberikan kewenangan dan pihak agen (*agent*) yaitu pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal. Hubungan agensi ini dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dengan pengertian sebagai berikut:

“an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Awalnya teori agensi lebih dikenal penerapannya untuk *corporate governance*, dimana digunakan untuk menjelaskan hubungan perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan pihak agen (manajemen). Baik pihak pemilik maupun pihak manajemen memiliki preferensinya masing-masing yang tidak jarang bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan munculnya permasalahan yang disebut *Agency Problem*. Masalah agensi muncul ketika pihak prinsipal memiliki keterbatasan informasi terhadap apa saja yang dilakukan oleh agen sebagai pengelola dana dan apakah kinerja agen telah memenuhi keinginan prinsipal atau tidak (Strom, 2002).

Hubungan kontrak antara agensi dan prinsipal ini kemudian dijelaskan oleh Baiman (1990) bahwa terdapat tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak pada saat melakukan hubungan kontrak. Persetujuan ini dapat digunakan sebagai solusi dari kemungkinan adanya *agency problem*. Sehingga teori agensi bertujuan untuk membantu dalam merancang kontrak yang dapat memenuhi kepentingan dari masing-masing pihak ketika konflik kepentingan terjadi (Scott, 2009).

Penerapan teori agensi tidak hanya bisa diterapkan pada *corporate governance* atau sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diterapkan pada pemerintahan (Lane, 2000). Ia menyebutkan bahwa pada dasarnya pemerintahan negara merupakan sebuah hubungan penugasan prinsipal-agen. Pihak prinsipal adalah rakyat sebagai pihak yang memberikan wewenang ke pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan agen yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk melakukan pemerintahan. Halim dan Abdullah (2006) menjelaskan dalam sebuah organisasi hubungan prinsipal dan agen berbentuk vertikal, yaitu pihak atasan sebagai prinsipal dan pihak bawahan sebagai agen. Sebagai akibat adanya hubungan ini, laporan keuangan disajikan oleh pemerintah kepada pihak prinsipal atau rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi akuntabilitas kinerjanya.

Hubungan antara posisi pemerintahan dengan teori agensi dan akuntabilitas dalam kinerja ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan ini pemerintah daerah utamanya diwajibkan untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan informasi kinerja keuangan pada tahun anggaran sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas kepada rakyat. Berdasarkan teori agensi maka pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan ini perlu diawasi untuk memastikan kepatuhan pihak pemerintah sebagai agen dalam melakukan tugasnya. Adanya pengungkapan mengenai informasi keuangan pemerintah daerah dapat menghindari adanya *asymmetry information* yang dapat menyebabkan adanya risiko kecurangan atau korupsi yang merupakan *agency problem* (Setiawan, 2012)

2.1.2 Signalling Theory

Teori *signalling* menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan harus memberi tahu pengguna laporan keuangan berupa sinyal-sinyal. Brigham & Houston (1999) menjelaskan bahwa sinyal merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini berakar pada asumsi bahwa setiap pihak memperoleh informasi yang berbeda. Pemilik informasi akan berusaha memberikan sinyal yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penerima informasi. Harapannya sinyal ini dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak penerima dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan pada sinyal yang diterima (Spance, 1973).

Informasi sangat memengaruhi kepercayaan dari pihak eksternal untuk menilai sebuah perusahaan. Informasi yang terbatas membuat pihak eksternal cenderung berusaha melindungi diri dengan memberi harga rendah untuk perusahaan karena dianggap kurang terpercaya. Anggapan lainnya pihak eksternal dapat berasumsi secara bebas mengenai perusahaan. Namun disisi lain perusahaan tidak dapat secara luas mengungkapkan informasi internalnya kepada pihak eksternal. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung akan memberikan sinyal-sinyal melalui pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memengaruhi pendapat dari penerima informasi dalam menilai perusahaan (Nuswandari, 2009). Teori ini juga dapat diaplikasikan pada perspektif pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanah oleh rakyat untuk melakukan pemerintahan di suatu daerah akan mendapatkan tuntutan oleh masyarakat untuk menunjukkan hasil dari kinerja dan pencapaian yang dihasilkan selama memerintah (Wau, 2015).

Berdasarkan *signalling theory*, untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan akan menunjukkan sinyal yang bernada positif sehingga bisa terus mendapatkan dukungan dari masyarakat (Isnri, 2018). Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat dalam bentuk sinyal-sinyal yang positif. Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan sinyal kepada masyarakat seperti dengan membuat

laporan keuangan, melakukan pengungkapan yang transparan maupun dengan membuat sistem pengendalian internal yang dapat dipercaya. Sinyal-sinyal ini diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintahan berjalan memiliki kinerja yang baik (Puspita & Martani, 2012).

Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Informasi ini kemudian disampaikan melalui pengungkapan dalam laporan keuangan oleh pemerintah daerah untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dalam bentuk informasi yang relevan dan dapat diandalkan (Madelia et al, 2018). Secara garis besar terdapat dua jenis sinyal yang dapat diberikan yaitu berupa sinyal langsung dan sinyal tidak langsung. Sinyal langsung dapat dilihat melalui pengungkapan informasi kinerja keuangan seperti laporan realisasi anggaran, sedangkan informasi tidak langsung dapat dilihat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi, metode penilaian dan lain-lain. Kedua jenis pengungkapan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah (Fauziah, 2017).

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang harus dipublikasikan secara sah sebagai alat kontrol manajemen dan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya pemilik, dan sumber

informasi yang berkaitan dengan keuangan bagi pihak non manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan (Susanti, 2010). Begitupun dengan laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk menampilkan informasi nilai sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama melakukan aktivitas operasional pemerintahan, mengevaluasi kondisi keuangan, efektivitas, dan efisiensi dari kinerja pemerintahan (Febriani & Harahap, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintahan diminta untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Menurut SAP tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan yang dibuat pemerintahan daerah meliputi, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Melalui laporan keuangan pemerintah daerah inilah masyarakat dapat menilai transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyampaikan informasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara spesifik untuk selama satu

periode laporan yang berisi anggaran dan realisasi dari pendapatan, pembiayaan beserta sumber pembiayaannya. Selanjutnya juga memberikan informasi mengenai jumlah aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah bahkan pengungkapan dari informasi-informasi seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, keuntungan maupun kerugian investasi dan lain-lain (Kurniawati et al, 2020). Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah adalah melakukan pengungkapan. Pengungkapan yang baik adalah pengungkapan yang dapat memberikan nilai informasi tambahan dan penjabaran yang relevan dan cukup mengenai kegiatan operasional dan kejadian-kejadian ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun berjalan yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi pemerintah (Ghozali & Chariri, 2007).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, pengungkapan pada laporan keuangan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang meliputi penjelasan lebih lanjut dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. CALK tidak hanya ditujukan untuk pihak tertentu saja namun ditujukan untuk pembaca laporan keuangan secara umum. Selain PP Nomor 71 Tahun 2010, pengungkapan LKPD juga diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun standar ini juga mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah disahkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. CALK pemerintah daerah harus dan dianjurkan untuk disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat memberikan informasi laporan keuangan yang wajar. Naopal et al (2017) menjelaskan bahwa CALK pada umumnya mengungkapkan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Pengungkapan atas informasi umum dari Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Memberikan informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan
3. Mengungkapkan capaian target keuangan selama periode pelaporan, disertai dengan kendala dan hambatan yang dihadapi.
4. Berisi informasi tentang pedoman penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan pada transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.
5. Menjelaskan dengan detail setiap pos laporan keuangan.
6. Berisi informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan.
7. Menyajikan informasi lain yang tidak dicantumkan dalam lembar muka laporan keuangan untuk memastikan penyajian laporan keuangan secara adil.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menetapkan standar yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang digunakan oleh entitas pemerintah yang diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun standar akuntansi pemerintah kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP dilengkapi dengan pengantar SAP dan merujuk pada Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari SAP Berbasis Akrual, SAP Berbasis Kas menuju Akrual, serta Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual sebagai tiga lampiran utama (Darma Putra & Ariyanto, 2015).

SAP adalah standar akuntansi yang diterapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP adalah panduan untuk meningkatkan pemahaman antara penyusun, pengguna dan auditor. SAP digunakan sebagai dokumen wajib untuk menyajikan laporan keuangan lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. SAP memiliki prinsip akuntansi yang diterapkan saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP juga mengontrol informasi yang harus diberikan dalam laporan keuangan, bagaimana hal itu ditentukan, diukur, dan dilaporkan. Selain itu, SAP mengatur para pengguna laporan

keuangan, termasuk legislator, untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan tersebut (Mardiasmo, 2009). Sedangkan auditor eksternal (BPK) akan memakai SAP sebagai standar dalam melakukan audit keuangan terhadap badan-badan pemerintahan yang mengelola keuangan negara (Syafitri, 2012).

Salah satu yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah adalah item-item apa saja yang harus diungkapkan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus diatur dalam “Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan” menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Pemerintah Daerah melalui laporan keuangan diharuskan untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap melalui Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan kata lain pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*).

2.1.5 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang menjadi bagian dari pulau Sulawesi dengan ibukota provinsinya adalah Kota Kendari. Berdasarkan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi ini terletak pada sebelah tenggara dari pulau Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 17 Kabupaten/Kota dengan penduduknya mayoritas merupakan suku Tolaki, Buton, Muna, Moronene, Bugis, dan suku lainnya. Dulunya daerah Sulawesi Tenggara merupakan salah satu

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, namun kemudian pada tanggal 27 April 1964 melalui Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964, daerah Sulawesi Tenggara resmi ditetapkan sebagai Daerah Otonom.

Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini memiliki luas daratan seluas 38.140 km² atau 3.814.000 ha dan memiliki luas perairan seluas 110.000 km² atau 11.000.000 ha dengan jumlah penduduk menurut data BPS Sulawesi Tenggara yaitu sebanyak sekitar 2.749.010 jiwa. Hal ini menjadikan provinsi Sulawesi Tenggara kaya akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berdasarkan BPK Sultra, struktur ekonomi di provinsi ini didominasi oleh beberapa sektor. Sektor pertanian mendominasi dengan persentase sebesar 38,12%, disusul sektor pengolahan sebesar 7,90% dan sektor perdagangan sebesar 15,22%. Potensi alam yang dihasilkan pada sektor pertanian yaitu seperti Kopi, Cengkeh, Pala, Jambu Mete, Kelapa Sawit, Kakao dan masih banyak lagi (HaloSultra, 2023). Tidak hanya itu Sulawesi Tenggara juga dikenal sebagai eksportir dari komoditi sektor pertambangan seperti Besi, Baja, Aspal, Emas, dan lain-lain dengan negara tujuan utamanya adalah Tiongkok, Amerika Serikat dan Korea Selatan (Rahma, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bersumber dari jurnal-jurnal dengan topik yang sama atau serupa. Penelitian terdahulu akan mencakup tinjauan

terhadap penelitian dan studi sebelumnya yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut merupakan tabel penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan acuan pada penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Variabel: Rasio Kemandirian Daerah			
No.	Penelitian & Tahun	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Wardani & Ariani, 2022)	Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 105 sampel Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
2	(Hiola & Harun, 2021)	Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan dari tujuh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang telah diaudit oleh (BPK) untuk tahun 2018-2020.	Hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
3	(Maulana & Handayani, 2015)	Jumlah sampel yang digunakan yaitu 78 laporan keuangan Kabupaten dan Kota di pulau Jawa tahun 2013	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.
Variabel: Indeks Pembangunan Manusia			
No.	Penelitian & Tahun	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Pramesti & Misran, 2021)	Jumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yaitu 13	Hasil penelitian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh

		Kabupaten/Kota. Sehingga jumlah sampel yang digunakan untuk periode tahun 2015-2018 adalah 52 LKPD.	signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kalimantan Selatan untuk tahun 2015-2018.
2	(Utami & Sulardi, 2019)	Sampel penelitian yaitu LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2017 yang memenuhi kriteria, sehingga jumlah sampelnya adalah 458 LKPD.	Hasil analisis pada 458 pemda menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
3	(Setyowati, 2016)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 314 laporan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014.	Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD.

Variabel: Jumlah Penduduk

No.	Penelitian & Tahun	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Rahim et al, 2020)	Populasi dan sampel penelitian adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk periode tahun 2015-2017 yang telah diaudit oleh BPK.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk.
2	(Budiarto & Indarti, 2019)	Jumlah sampel yaitu berasal dari LKPD dari 35 Kabupaten/Kota pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017	Penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan di Jawa Tengah.
3	(Naopal et al, 2017)	Populasi yang digunakan yaitu LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2014-2015 dengan total sampel 54 LKPD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2014-2015.

		Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2015.	
--	--	---	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2012) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah kesanggupan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah yang meliputi pembangunan, ekonomi serta pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang bersedia membayarkan pajak serta retribusi daerah dan digunakan untuk menambah sumber PAD. Rasio kemandirian daerah menunjukkan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yaitu pendapatan dari transfer pusat dan penerimaan pembiayaan seperti dari pinjaman (Girsang & Yuyetta, 2015).

Hubungan antara rasio kemandirian daerah dengan tingkat pengungkapan LKPD di suatu daerah merupakan bentuk konsekuensi dari hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen yang mengolah pendapatan asli daerah yang dapat dijelaskan melalui teori agensi. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai pihak prinsipal akan menyebabkan munculnya tekanan yang diberikan oleh masyarakat ke pemerintah sebagai pihak agen yang

diberikan kewenangan untuk melakukan transparansi atas hasil pengelolaan dari pendapatan tersebut (Maulana & Handayani, 2015). Oleh karena itu semakin tinggi rasio kemandirian daerah menunjukkan kontribusi masyarakat atas pendapatan daerah semakin tinggi artinya masyarakat akan cenderung untuk menuntut pengungkapan pemerintah daerah atas pengelolaan pendapatan tersebut (Lesmana, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Ariani (2022) serta Maulana & Handayani (2015) menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Hiola dan Harun (2021) menunjukkan hasil bahwa kemandirian daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dimana semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan dalam LKPD. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik memaksa pemerintah daerah untuk membuat pertanggungjawaban atas sumber daya yang telah dipakai kepada masyarakat sebagai objek pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H1: Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tolok ukur yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Tingkat IPM dapat menunjukkan tingkat ketercapaian atas kemajuan yang diraih suatu masyarakat artinya IPM yang baik akan cenderung memiliki sumber daya manusia yang baik dalam pemerintahan. Komunitas yang memiliki tingkat kualitas hidup yang telah berkembang dengan baik dibutuhkan untuk menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik (Setyowati, 2016).

Dalam konteks teori agensi, suatu daerah dengan IPM yang tinggi dapat jelaskan akan memiliki inisiatif dan kesadaran atas kebutuhan informasi mengenai hasil kinerja dari pemerintahan di daerahnya. Sehingga rakyat yang merupakan prinsipal akan lebih menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan amanah. Kualitas hidup dan tingkat pengetahuan yang baik akan menyebabkan berkembangnya kebutuhan dan keinginan yang dituntut oleh masyarakat kepada pemerintah (Pramesti & Misran, 2021). Akibatnya pemerintah akan berusaha membuat laporan keuangan yang dapat mengungkapkan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai sinyal bahwa pemerintah mampu menjalankan pemerintahan dengan semestinya.

Hasil penelitian Pramesti & Misran (2021) menunjukkan hasil bahwa IPM tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan

LKPD. Berbeda dengan hasil penelitian dari Utami & Sulardi (2019) serta Setyowati (2016) yang menjabarkan hasil bahwa IPM memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dimana memberikan bukti bahwa IPM memengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan pemda secara positif dan signifikan. Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H2: *Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.*

2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Daerah dengan jumlah penduduk yang banyak atau besar menandakan *stakeholder* yang memiliki keragaman pada latar belakang dan sikap terhadap pemerintahan sehingga tingkat pengawasan dari masyarakat sebagai *stakeholder* juga akan lebih besar (Rahim & Martani, 2016). Jumlah penduduk yang besar juga menggambarkan tingkat kompleksitas disuatu daerah, dimana pemangku kepentingan di daerah tersebut cenderung akan memiliki kebutuhan informasi yang lebih beragam (Hendriyani & Tahar, 2015). Artinya, semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, semakin banyak pekerjaan pemerintah yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Karena banyaknya layanan yang ditawarkan, serta tingginya tekanan dan permintaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan karena banyaknya pemangku kepentingan,

daerah dengan jumlah penduduk yang besar akan mengalami tekanan yang besar terhadap pengungkapan informasi pengelolaan keuangan.

Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan kompleksitas dari pelayanan dan program pemerintah di suatu daerah. Dimana dalam melakukan pelayanan dan program ini tentu menggunakan APBD yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah memberikan banyak tekanan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dan informasi yang tersedia untuk umum (Evans & Patton, 1987). Dalam konteks teori agensi, pemerintah daerah sebagai agen akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak melalui laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan konsekuensi kepada prinsipal yaitu masyarakat serta sebagai sinyal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa pemerintahan yang dilakukan telah dieksekusi dengan baik (Martani & Lestiani, 2012).

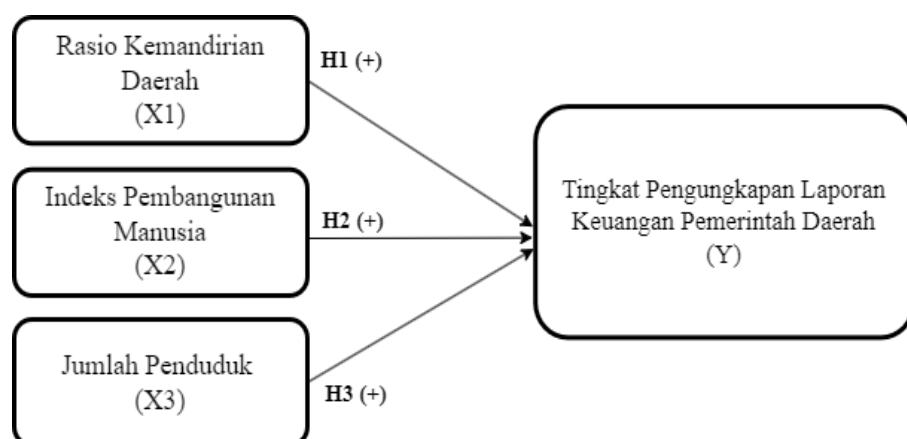
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naopal et al (2017) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahim et al (2020) serta Budiarto & Indarti (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu jumlah penduduk menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD yang artinya jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan program pelayanan masyarakat yang lebih banyak akibatnya pengungkapan yang

informasi pada LKPD akan lebih banyak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H3: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.4 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan mempelajari pengaruh dari Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga terdapat variabel independen yang memengaruhi (X) dan variabel dependen yang dipengaruhi (Y). Variabel independen pada penelitian ini yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk. Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Pengungkapan LKPD. Berdasarkan penjabaran dari masing-masing hipotesis diatas, maka dapat kerangka pemikiran penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, yang merupakan metode untuk mengetahui apakah sebuah hubungan atau pengaruh antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen. Kriteria kaidah keilmuan yang digunakan pada penelitian jenis ini yaitu sistematis, empiris, rasional, objektif, terukur, dan konkret. Melalui penelitian kuantitatif ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel X1 (Rasio Kemandirian Daerah), variabel X2 (Indeks Pembangunan Manusia), dan variabel X3 (Jumlah Penduduk) dengan variabel Y (Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah).

3.2 Populasi dan Sampel

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari LKPD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Populasi pada penelitian ini adalah LKPD dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *nonprobability sampling* metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempublikasikan LKPD berturut-turut tahun 2018-2022 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (Pramesti & Misran, 2021). Sehingga total sampel yang memenuhi kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu 68

sampel LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berasal dari 17 LKPD dikalikan 4 tahun dari periode 2018-2021.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Pemerintah sebagai agen dalam teori agensi memiliki peran sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab dan amanah oleh rakyat sebagai prinsipal. Dengan tugas yang diberikan ini, maka pemerintah diharapkan untuk melakukan kegiatan dan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerahnya. Dalam menjalankan tugas ini tentu saja pemerintah akan menggunakan sumber daya daerahnya yang tentu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bentuk pertanggungjawaban dituangkan melalui penyajian Laporan Keuangan Daerah yang didalamnya juga terkandung pengungkapan yang diatur. Pengungkapan keuangan pemerintah daerah ini menjadi konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai agen untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dari pemerintahannya (Ahmad, 2005).

Variabel Dependen pada penelitian ini merupakan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Pengungkapan (*Disclosure*) dapat diartikan sebagai bentuk transparansi atau tidak menutup-nutupi. Pada konteks laporan keuangan maka pengungkapan adalah bentuk penyajian informasi yang lengkap dan relevan mengenai

kegiatan dan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Ghozali & Chariri, 2007). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan sepenuhnya atau *full disclosure* agar laporan keuangan dapat menjadi referensi sumber informasi yang transparan dan akuntabel serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Standar Akuntansi Pemerintah secara khusus telah mengatur item-item pengungkapan yang wajib diungkapkan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode indeks *scoring* untuk mengukur tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pengungkapan akan dinilai berdasarkan banyaknya item-item yang wajib diungkapkan pada LKPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010. Tabel indeks pengungkapan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada tabel item-item yang wajib diungkapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mencakup item-item dalam PSAP Nomor 4 sampai dengan PSAP Nomor 9 serta 7 item yang wajib diungkapkan pada CALK yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Sistematika penilaian dilakukan dengan sebagai berikut:

- a) Memeriksa ada tidaknya item pengungkapan wajib pada CALK LKPD berdasarkan pada kriteria pada Lampiran 1.

- b) Memberikan skor 1 (satu) apabila item pengungkapan terdapat pada LKPD dan skornya 0 (nol) apabila item pengungkapan tidak tersedia di LKPD.
- c) Menjumlahkan nilai-nilai yang didapatkan dari setiap LKPD.
- d) Menghitung tingkat pengungkapan LKPD dengan menggunakan rumus tingkat pengungkapan menurut Naopal et al (2017) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengungkapan LKPD} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}} \times 100$$

3.3.2 Variabel Independen

Terdapat tiga variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.

3.3.2.1 Rasio Kemandirian Daerah

Mahmudi (2016) mendefinisikan Rasio Kemandirian yaitu rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan kemampuan pemda untuk mendanai kegiatan atau aktivitas, pembangunan dan pemberian layanan pemerintah dengan pendapatan dari daerah itu sendiri dibandingkan dengan

pendapatan dari sumber yang lain, seperti transfer dari pusat dan pendanaan yang bersumber dari pinjaman (Girsang & Yuyetta, 2015).

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal pemerintahan daerah. Dimana semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah begitu juga sebaliknya (Halim & Kasufi, 2011). Pada penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah dana transfer serta penerimaan pembiayaan. Rumus yang digunakan yaitu berdasarkan pada penelitian Utami dan Sulardi (2019), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan transfer} + \text{Penerimaan Pembiayaan}}$$

3.3.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar

yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat, 2) Pengetahuan, 3) Standar hidup layak. IPM dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu: $IPM < 60$ termasuk dalam kategori rendah; $60 \leq IPM \leq 70$ kategori sedang; $70 \leq IPM \leq 80$ kategori tinggi; dan $IPM \geq 80$ kategori sangat tinggi (BPS, 2021).

Dimana semakin tinggi nilai IPM maka capaian pembangunan manusia juga semakin tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Semakin tinggi tingkat pembangunan masyarakat, keinginan mereka untuk berbagai informasi juga meningkat, sehingga hal ini mendorong pihak pengelola pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif dan terperinci (Pramesti & Misran, 2021). Badan Pusat Statistik di Indonesia pada setiap tahunnya melakukan pengukuran atas skor Indeks Pembangunan Manusia di setiap daerahnya. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada penelitian ini berdasarkan pada skor IPM yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2018-2021.

Indeks Pembangunan Manusia = Skor IPM

3.3.2.3 Jumlah Penduduk

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan jumlah individu yang pada waktu tertentu tinggal di suatu daerah serta suatu hasil dari proses demografi yang meliputi kematian, kelahiran, dan migrasi (Said, 2001). Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah akan menentukan banyaknya pelayanan publik dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Pengukuran kompleksitas suatu pemerintah daerah (Pemda) dapat dilihat dari populasi. Dengan kata lain, tingkat kompleksitas sebuah pemerintah daerah dapat dikatakan berkorelasi positif dengan kebutuhan untuk menyajikan informasi yang lebih rinci dalam laporan keuangan. Penduduk merupakan komponen utama dalam penentuan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Semakin banyaknya masyarakat membuat kompleksitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik juga semakin meningkat (Rahim et al, 2020). Seiring meningkatnya kompleksitas pemerintah daerah, diperlukan juga tingkat pengungkapan informasi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (Utami & Sulardi, 2019). Sumber data jumlah penduduk yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data

jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2018-2021.

$$\text{Jumlah Penduduk} = \ln \text{Jumlah Penduduk}$$

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghitung data, serta mencatat data sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini yang berasal dari sumber yang telah mendokumentasikan data tersebut (Suharsimi, 2013). Data tingkat pengungkapan dan Rasio Kemandirian Daerah dikumpulkan dan dihitung berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan data skor IPM dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara merupakan data sekunder yang berasal dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini untuk dapat menganalisa data digunakan metode analisis statistik yaitu metode analisis regresi linier berganda dan statistik deskriptif untuk melihat signifikansi hubungan antara tingkat pengungkapan LKPD dengan rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan

jumlah penduduk. Analisis linier regresi berganda dilakukan dengan bantuan *software IBM SPSS Statistic 22.0*. Pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan informasi numerik yang krusial untuk menggambarkan data sampel. Informasi numerik yang telah disederhanakan ini akan membantu dalam menganalisis dan menafsirkan masing-masing variabel secara keseluruhan. Uji statistik deskriptif dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gambaran secara umum dari masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini. Masing-masing variabel akan dijabarkan berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi yang menunjukkan gambaran dari persebaran data (Ghozali, 2018).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dilaksanakan saat melakukan analisis regresi linear berganda berbasis *ordinary least square* (OLS) sebagai persyaratan statistik. Dimana untuk perlu dilakukan beberapa pengujian untuk memenuhi persyaratan klasik tersebut yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dilakukan pada penelitian menghasilkan residual yang berdistribusi normal atau tidak, dimana pengujiannya dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2018).

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah antara residual variabel satu dengan yang lainnya memiliki korelasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* (dw) yang dihasilkan. Apabila nilai $dw < dl$ atau $dw > 4-dl$ maka terdapat autokorelasi, apabila $dl < dw < du$ maka tidak ada kesimpulan dan apabila $du < dw < 4-du$ kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi. Nilai dl dan du didapatkan dari tabel *durbin watson*.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Glejser* dan batas alpha 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas dan

apabila lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk memastikan pada model regresi tidak terjadi kesamaan pada varian antara residual pada pengamatan satu dibandingkan dengan residual pengamatan lainnya.

3.5.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada suatu model regresi penelitian, dimana model regresi yang baik akan menunjukkan hasil tidak terdapat gejala multikolinearitas. Untuk mengujinya dilihat berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance* yang dihasilkan. Apabila nilai VIF < 10,00 dan *Tolerance* > 0,10 maka disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas, begitupun sebaliknya.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk membantu menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05, berikut merupakan model penelitian yang disusun:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Y = Tingkat Pengungkapan LKPD

α = Koefisien Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Variabel independen Rasio Kemandirian Daerah

X_2 = Variabel independen Indeks Pembangunan Manusia

X_3 = Variabel independen Jumlah Penduduk

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan terdiri atas tiga metode pengujian yaitu, Uji Koefisien Determinasi, Uji Simultan (Uji F) dan Uji Parsial (Uji t). Berikut merupakan penjelasan atas masing-masing uji:

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018) uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan dari model penelitian untuk menjelaskan pengaruh dari variasi variabel dependen. Untuk menentukan tingkat kemampuannya, Nilai koefisien determinasi dapat ditentukan berdasarkan R^2 dan *Adjusted R²*. Semakin dekat nilai R^2 dan *Adjusted R²* dengan 1 (satu) maka semakin baik model penelitian yang digunakan dalam

menjelaskan variabel dependen yang diteliti, begitupun sebaliknya. Namun nilai R^2 memiliki kelemahan yaitu bias terhadap variabel dependen pada model, oleh karena itu pada penelitian ini dalam melakukan uji koefisien determinasi menggunakan *Adjusted R²*

3.5.4.2 Uji Fit Model (Uji F)

Pada uji fit model (uji F) dilakukan pengujian atas pengaruh dari variabel independen yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama dalam memengaruhi variabel dependen Tingkat Pengungkapan LKPD serta untuk menguji apakah model penelitian regresi linier berganda yang digunakan telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Ghozali (2018) untuk melakukan pengujian pada uji F, maka dibandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Ketentuan pengambilan keputusan untuk pengujian yaitu sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan apabila nilai p-value F-statistik $< 0,05$. Artinya Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD.
- 2) H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan apabila nilai p-value F-statistik $> 0,05$. Artinya Rasio

Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama tidak memengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD.

3.5.4.3 Uji t

Uji t atau uji parsial pada penelitian digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk dalam memengaruhi variabel dependen Tingkat Pengungkapan LKPD. Berdasarkan pernyataan dari Ghozali (2018) yaitu untuk menguji pengaruh ini maka perlu dibandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel} dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka ketentuan pengambilan keputusan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $p\text{-value}$ uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{-value}$ uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil-hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini yang terdiri atas pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis akan digunakan sebagai bahan pembahasan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 4.1 yang menyajikan informasi mengenai hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Dimana variabel independen yaitu terdiri atas Rasio Kemandirian Daerah (RKD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk (JP). Serta variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan LKPD. Data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 68 sampel. Nilai minimum pada tabel menunjukkan nilai terendah dari data variabel, nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi, *mean* menunjukkan nilai rata-rata dari data variabel, serta standar deviasi menunjukkan sebaran jumlah nilai dari masing-masing variabel. Berikut merupakan hasil dari pengujian untuk statistik deskriptif:

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
RKD	0,02	0,24	0,06088	0,04629
IPM	63,46	84,15	68,9387	4,73865
JP	10,42	12,91	11,7875	0,62947
TP	45,28	62,26	52,8022	4,02555

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1, maka dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

4.1.1 Variabel Rasio Kemandirian Daerah (RKD)

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa untuk variabel Rasio Kemandirian Daerah memiliki nilai minimum atau terendah sebesar 0,02 atau 2% yang artinya rasio kemandirian daerah terendah pada Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebesar 2%. Nilai maksimumnya menunjukkan hasil sebesar 0,24 atau 24% artinya rasio kemandirian tertingginya adalah 24%, sedangkan untuk rata-rata rasio kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara adalah sebesar 0,06088 atau 6,088%. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0,04629 yang apabila dibandingkan antara *mean* menunjukkan bahwa data untuk variabel rasio kemandirian daerah penyebaran datanya tidak bervariasi karena nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi.

Nilai terendah dan nilai tertinggi dari rasio kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara menurut tabel Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah menunjukkan hasil bahwa Kabupaten/Kota di

Sulawesi Tenggara masih memiliki kemampuan keungan sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat. Pola hubungan instruktif menandakan bahwa pengaruh atau peranan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat dominan (Halim, 2004). Rata-rata rasio kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota nilainya hanya sebesar 6,088%, bahkan tidak mencapai 10% artinya rata-rata pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer dan penerimaan pembiayaan.

Tabe 4.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim & Kasufi, 2011

4.1.2 Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia menurut tabel 4.1 menunjukkan hasil untuk nilai IPM terendah adalah sebesar 63,4 dan nilai IPM tertinggi adalah 84,15. Sedangkan untuk rata-rata nilai IPM untuk Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara adalah sebesar 68,9387 dan standar deviasi sebesar 4,73865. Menurut tabel 4.3, untuk nilai IPM terendah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara sudah termasuk pada kategori Sedang, sedangkan untuk nilai tertinggi sudah masuk dalam kategori

Tinggi yang artinya pembangunan manusia sudah cukup tinggi. Berdasarkan nilai rata-rata maka IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara sudah tergolong dalam kategori Sedang yang artinya masih tergolong dalam tingkat menengah. Apabila dibandingkan dengan data rata-rata IPM di Indonesia menurut BPS (2022) untuk tahun 2018-2021 yaitu sebesar 71,885, sedangkan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara memang masih lebih rendah yaitu sebesar 68,9387. Namun rata-rata indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara bisa dikatakan menunjukkan nilai yang cukup baik.

Tabel 4.3 Kategori IPM

Kategori	Tingkat IPM
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber: BPS, 2021

4.1.3 Variabel Jumlah Penduduk (JP)

Pada tabel 4.1 variabel Jumlah Penduduk menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk nilai *mean* atau rata-rata jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 45,62. Nilai terendah untuk jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 45,28 dan nilai tertinggi untuk jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 62,26. Sedangkan untuk nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah

sebesar 0,62947. Untuk memperkecil skala data jumlah penduduk maka pada pengujian ini data jumlah penduduk diubah ke dalam bentuk LN (Logaritma Natural).

4.1.4 Variabel Tingkat Pengungkapan LKPD (TP)

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Tingkat Pengungkapan LKPD pada tabel 4.1 menunjukkan hasil bahwa untuk tingkat pengungkapan LKPD paling rendah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2021 adalah hanya sebesar 45,28%. Sedangkan untuk tingkat pengungkapan LKPD paling tinggi adalah sebesar 62,26%. Nilai rata-rata tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara untuk tahun 2018-2021 yaitu sebesar 52,8022%. Nilai ini tergolong cukup rendah artinya *full disclosure* atau pengungkapan penuh yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara tidak dilakukan dengan semestinya karena hanya memenuhi kurang lebih setengah dari kriteria yang ditentukan. Nilai standar deviasi untuk tingkat pengungkapan LKPD menunjukkan hasil sebesar 4,02555.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai uji persyaratan untuk menguji apakah data yang digunakan memiliki penyimpangan terhadap setiap uji asumsi klasik atau asumsi untuk persamaan regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi yang dilakukan yang dilakukan pada penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Dimana data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ dan dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya $\leq 0,05$. Pada tabel 4.4 menampilkan hasil dari uji normalitas yang telah dilakukan.

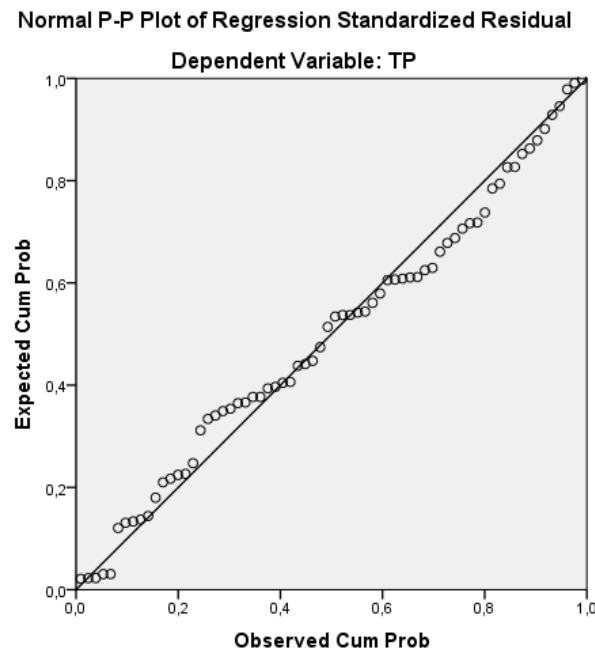
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* yang dihasilkan adalah 0,200. Nilai signifikansi 0,200 ini lebih besar dari 0,05 ($0,200 \geq 0,05$) yang berdasarkan syarat pengambilan keputusan dalam melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan terdistribusi normal dan telah memenuhi persyaratan nilai residual data terdistribusi normal. Selain menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan uji normal *probability plot*. Menurut Raharjo (2021) nilai residual data dapat dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik data pada mengikuti pola garis diagonal kurva. Oleh karena

itu berdasarkan hasil visualisasi yang ditampilkan pada gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa nilai residual data telah terdistribusi normal.



Gambar 4.1 Hasil uji normal *probability plot*

4.2.2 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan sebagai salah satu uji asumsi klasik untuk melakukan pengujian dengan model regresi berganda yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara nilai residual pada periode t dengan nilai residual pada periode $t-1$ (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson (dw). Apabila nilai $dw < dl$ atau $dw > 4-dl$ maka terdapat autokorelasi, apabila $dl < dw < du$ maka tidak ada kesimpulan dan apabila $du < dw < 4-du$ kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi. Nilai dl dan du didapatkan dari tabel Durbin Watson. Model regresi dapat dikatakan baik ketika hasil dari uji

autokorelasi menunjukkan hasil yang bebas dari gejala autokorelasi (Raharjo, 2021).

Tabel 4.5 Hasil Tabel DW

dl	1,5164
du	1,7001
4-dl	2,4836
4-du	2,2999

Sumber: Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
2,510	Terdapat Autokorelasi ($dw > dl$)

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Tabel 4.5 menunjukkan hasil dari nilai dl, du, 4-dl, dan 4-du yang dihitung berdasarkan Tabel DW dengan nilai $\alpha = 5\%$, $n = 68$ dan $k = 3$. Nilai dl, du, 4-dl, dan 4-du berguna sebagai perbandingan dalam pengambilan keputusan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai dw yang dihasilkan adalah 2,510 artinya terdapat autokorelasi berdasarkan pengujian ini karena $2,510 > 2,4836$. Oleh karena itu dilakukan transformasi data menggunakan LAG pada variabel dependen untuk mengatasi gejala autokorelasi ini.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data

<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
2,064	Tidak Terdapat Autokorelasi ($du < dw < 4-du$)

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Setelah melakukan transformasi data untuk mengatasi gejala autokorelasi maka didapatkan hasil pada tabel 4.7. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil nilai d_w sebesar 2,064 yang apabila dibandingkan dengan nilai d_l , d_u , $4-d_l$, dan $4-d_u$ didapatkan hasil bahwa $1,7001 < 2,064 < 2,2999$ atau $d_u < d_w < 4-d_u$ yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas merupakan elemen dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan dalam varians residu antar pengamatan dalam model regresi. Pada pengujian ini digunakan metode *Glejser* untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan batas α 0,05. Dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan dinyatakan terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Menurut Raharjo (2021) model regresi dikatakan baik apabila tidak memiliki gejala heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikansi	Nilai Kritis	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	0,458	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0,350	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jumlah Penduduk (X3)	0,796	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Hasil uji *glejser* ditunjukkan pada tabel 4.8 dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dengan nilai kritis 0,05. Berdasarkan pengujian untuk variabel Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,458 yang lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai signifikansi 0,350 yang lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan untuk variabel Jumlah Penduduk menunjukkan nilai signifikansi 0,796 yang lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu disimpulkan variabel independen yang digunakan pada pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada suatu model regresi penelitian. Model regresi dikatakan baik ketika tidak terjadi adanya

gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat ditentukan berdasarkan nilai *cut off* nilai *tolerance* sebesar 0,10 dan nilai VIF sebesar 10. Dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* yang dihasilkan dari uji lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10. Dikatakan terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF yang dihasilkan lebih besar dari 10 (Ghozali, 2018).

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	0,162	6,190	Tidak terjadi multikolinearitas
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0,199	5,037	Tidak terjadi multikolinearitas
Jumlah Penduduk (X3)	0,500	2,000	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.9. Berdasarkan tabel tersebut variabel independen Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk tidak mengalami gejala multikolinearitas karena nilai *tolerance* yang dihasilkan dari uji lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis hipotesis yang dilakukan untuk membantu menunjukkan hubungan pengaruh antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk. berikut merupakan model penelitian yang dihasilkan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Y = Tingkat Pengungkapan LKPD

α = Koefisien konstanta dari persamaan regresi

β = Koefisien regresi

X_1 = Variabel independen Rasio Kemandirian Daerah

X_2 = Variabel independen Indeks Pembangunan Manusia

X_3 = Variabel independen Jumlah Penduduk

Hasil dari uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	24,822	18,717		1,326	0,190
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	-2,316	25,188	-0,027	-0,092	0,927
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0,216	0,222	0,254	0,974	0,334
Jumlah Penduduk (X3)	1,121	1,053	0,175	1,065	0,291

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda pada tabel 4.10, maka dapat dirumuskan model persamaan regresi yang dapat menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan LKPD dengan variabel independent yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 24,822 - 2,316 X_1 + 0,216 X_2 + 1,121 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas diketahui bahwa nilai konstanta (α) yang dihasilkan yaitu bernilai positif 24,822. Nilai ini dapat diartikan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan bertambah sebesar 24,822 ketika regresi variabel rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk dinyatakan konstan (nol).

Pada persamaan regresi yang dihasilkan, diketahui bahwa nilai untuk koefisien regresi untuk variabel rasio kemandirian daerah (X_1) menunjukkan hasil negatif sebesar 2,316. Nilai koefisien regresi ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan pada rasio kemandirian daerah, maka akan menyebabkan penurunan pada tingkat pengungkapan LKPD sebesar 2,316 dengan asumsi variabel independent lainnya pada persamaan konstan. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan sebesar 1 satuan pada rasio kemandirian daerah, maka akan menyebabkan kenaikan pada tingkat pengungkapan LKPD sebesar 2,316 dengan asumsi variabel independent lainnya pada persamaan konstan. Dengan kata lain ketika rasio kemandirian daerah meningkat, maka tingkat pengungkapan LKPD akan menurun karena memiliki hubungan arah yang negatif.

Koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai positif sebesar 0,216 pada persamaan regresi. Nilai koefisien ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan sebanyak 1 satuan pada indeks Pembangunan manusia maka akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,216 pada tingkat pengungkapan LKPD dengan asumsi variabel independent lainnya konstan. Dengan kata lain, apabila rasio kemandirian daerah meningkat maka tingkat pengungkapan LKPD juga akan meningkat karena memiliki hubungan arah positif.

Koefisien regresi variabel jumlah penduduk pada persamaan memiliki nilai positif sebesar 1,121. Nilai koefisien ini memiliki arti bahwa setiap terjadi peningkatan sebesar 1 satuan pada jumlah penduduk maka akan

menyebabkan terjadi peningkatan sebesar 1,121 pada tingkat pengungkapan LKPD dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Ketika variabel jumlah penduduk meningkat, maka tingkat pengungkapan LKPD juga akan meningkat karena memiliki hubungan arah yang positif.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis yang dibuat dapat diterima atau tidak. Pada pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengujian yang terdiri atas uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari masing-masing pengujian:

4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji yang bertujuan untuk menentukan tingkat kemampuan dari model penelitian untuk menjelaskan pengaruh dari variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan berdasarkan nilai *Adjusted R Square* (R^2) yang memiliki rentang nilai diantara nilai nol sampai satu. Dimana apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu, maka dapat dikatakan variabel-variabel independen hampir secara keseluruhan memprediksi variabel dependen penelitian sehingga hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi mendekati nol, maka dapat dikatakan kemampuan dari variabel-variabel independent yang digunakan dalam memberikan prediksi terhadap variabel dependen sangat terbatas sehingga hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,364	0,133	0,092	3,83554

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) yang dihasilkan dari pengujian adalah sebesar 0,092 atau 9,2%. Nilai ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dari Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independen dalam memengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD adalah sebesar 9,2%, sedangkan sisa persentase yaitu 90,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

4.4.2 Hasil Uji *Fit Model* (Uji F)

Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang digunakan telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara gabungan terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh ini maka dilakukan perbandingan atas nilai F yang dihasilkan pada pengujian dengan F_{tabel} serta *p-value* F-statistik (Ghozali, 2018). Ketentuan pengambilan keputusan untuk pengujian yaitu sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan apabila nilai *p-value* F-statistik $< 0,05$. Artinya variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.
- 2) H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan apabila nilai *p-value* F-statistik $> 0,05$. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen.

Berikut merupakan hasil dari uji F yang telah dilakukan:

Tabel 4.12 Hasil Uji F

	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	<i>Sig.</i>
Regression	144,210	3	63,829	3,268	0,027
Residual	941,527	64	19,529		
Total	1058,737	67			

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian data dari masing-masing variabel maka didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel 4.12. Pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa nilai F_{hitung} yang dihasilkan adalah 3,268 dan *p-value* F-statistik sebesar 0,027. Nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,746 dengan ketentuan α sebesar 0,05, $df_1 = k$ atau 3, dan $df_2 = n-k$ atau $68-3 = 65$. Berdasarkan hasil F_{hitung} dan F_{tabel} maka diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Tingkat Pengungkapan LKPD karena nilai $F_{hitung} = 3,268$ lebih besar dari $F_{tabel} = 2,746$ ($3,268 > 2,746$). Hasil ini juga didukung dengan nilai *p-*

value F-statistik = 0,027 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,027 < 0,05$). Hasil uji ini juga menunjukkan bahwa model penelitian yaitu model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini telah *fit* atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

4.4.3 Hasil Uji t

Uji t atau uji parsial merupakan salah satu uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau terpisah dari masing-masing variabel independent pada penelitian ini terhadap variabel dependennya. Untuk menguji pengaruh ini maka perlu dibandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel} dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2018). Maka ketentuan pengambilan keputusan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai *p-value* uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan *p-value* uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan hasil dari uji t yang telah dilakukan:

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Variabel Independen	t	Sig.	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	-0,092	0,927	Hipotesis (H_1) tidak didukung
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0,974	0,334	Hipotesis (H_2) tidak didukung
Jumlah Penduduk (X3)	1,065	0,291	Hipotesis (H_3) tidak didukung

Berdasarkan hasil uji t tabel 4.13, maka analisis hasil uji t pada tabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Nilai t_{hitung} yang dihasilkan untuk variabel Rasio Kemandirian Daerah adalah negatif 0,092 (-0,092), t_{tabel} yaitu sebesar 1,998 dengan ketentuan α sebesar 0,05, $\alpha/2$ atau $0,05/2 = 0,025$, nilai $n-k-1$ atau $68-3-1 = 64$. Serta $p-value$ uji t yang dihasilkan sebesar 0,927. Maka dapat disimpulkan variabel rasio kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD atau H_0 diterima dan H_1 ditolak karena $t_{hitung} = -0,092 < t_{tabel} = 1,998$ dan $p-value$ uji t = $0,927 > 0,05$.
- 2) Nilai t_{hitung} yang dihasilkan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah 0,974, t_{tabel} yaitu sebesar 1,998 dengan ketentuan α sebesar 0,05, $\alpha/2$ atau $0,05/2 = 0,025$, nilai $n-k-1$ atau $68-3-1 = 64$. Serta $p-value$ uji t yang dihasilkan sebesar 0,334. Maka dapat disimpulkan variabel rasio kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD atau H_0 diterima

dan H_1 ditolak karena $t_{hitung} = 0,974 < t_{tabel} = 1,998$ dan p -value uji t = $0,334 > 0,05$.

- 3) Nilai t_{hitung} yang dihasilkan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah 1,065, t_{tabel} yaitu sebesar 1,998 dengan ketentuan α sebesar 0,05, $\alpha/2$ atau $0,05/2 = 0,025$, nilai $n-k-1$ atau $68-3-1 = 64$. Serta p -value uji t yang dihasilkan sebesar 0,290. Maka dapat disimpulkan variabel rasio kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD atau H_0 diterima dan H_1 ditolak karena $t_{hitung} = 1,065 < t_{tabel} = 1,998$ dan p -value uji t = $0,290 > 0,05$.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan secara garis besar dapat diketahui bahwa tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tergolong rendah. Dengan nilai terendah dari pengungkapan LKPD yaitu pengungkapan LKPD yang dilakukan oleh Kabupaten Kolaka Utara untuk tiga tahun berturut-turut dari tahun 2019-2021, yaitu dengan tingkat pengungkapan hanya sebesar 45,28%. Sedangkan untuk tingkat pengungkapan LKPD paling tinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat untuk tahun 2020 yaitu adalah sebesar 62,26%. Nilai rata-rata tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara sendiri untuk tahun 2018-2021 yaitu sebesar 52,8022%. Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tingkat persentasi pengungkapan seperti ini cukup sering ditemukan. Pada penelitian Utami dan Sulardi (2019) menunjukkan bahwa

tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tahun 2017, rata-rata hanya sebesar 60,42%. Sangat jarang ditemukan tingkat pengungkapan yang dilakukan secara lengkap. Padahal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, secara jelas disebutkan bahwa salah satu dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan pemerintah adalah prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure*). Pengungkapan lengkap yang dimaksud yaitu laporan keuangan disajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang kemudian informasi ini disajikan melalui Catatan atas Laporan Keuangan. Melalui penjelasan ini pengungkapan lengkap secara tidak langsung diwajibkan, namun kelemahan pada konteks kalimat yang masih cukup rancu kemungkinan mengakibatkan pemerintah daerah menjadi tidak begitu terdorong untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap.

Berdasarkan penjabaran dari teori agensi dan *signalling*, tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil uji simultan pada pembahasan tabel 4.12 menunjukkan hasil bahwa variabel-variabel ini secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan LKPD. Namun pengaruhnya tidak begitu signifikan karena berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh dari rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk sebagai variabel independen dalam

memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD yaitu hanya sebesar 9,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Pembahasan pengaruh dari variabel rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara akan dijelaskan pada pembahasan sebagai berikut:

4.5.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Tingkat

Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji dalam penelitian ini, nilai koefisien untuk variabel rasio kemandirian daerah menurut persamaan regresi menunjukkan nilai negatif sebesar 2,658 yang berarti setiap kenaikan sebesar 1 satuan pada rasio kemandirian daerah, maka akan menyebabkan penurunan pada tingkat pengungkapan LKPD sebesar 2,658 dengan asumsi variabel independent lainnya pada persamaan konstan. Hubungan antara rasio kemandirian daerah (X_1) dan tingkat pengungkapan LKPD (Y) memiliki hubungan arah yang negatif.

Berdasarkan hasil regresi untuk uji t atau uji parsial, didapatkan nilai t_{hitung} yang dihasilkan untuk variabel rasio kemandirian daerah adalah negatif 0,092 (-0,092), t_{tabel} yaitu sebesar 1,998, α sebesar 5% atau 0,05 dan p-value uji t = 0,927. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = -0,092 < t_{tabel} = 1,998$ dan p-value uji t = 0,927 > 0,05, sehingga **H_1 ditolak** yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari rasio

kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian daerah merefleksikan kemampuan dari suatu daerah dalam memaksimalkan potensi daerahnya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga nilai rasio kemandirian daerah yang tinggi menandakan pemerintah daerah yang telah cukup mandiri dan telah memiliki ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat yang rendah. Namun berdasarkan hasil data yang telah diolah, rasio kemandirian daerah dari Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021 masih dalam kondisi instruktif. Dengan rata-rata rasio kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota hanya sebesar 0,06088 atau 6,088% artinya sebanyak 93,912% pendapatan dari pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dan penerimaan pembiayaan. Bahkan rasio kemandirian daerah tertinggi dari tahun 2018-2021 hanya mencapai nilai sebesar 0,24 atau 24%.

Kondisi tingkat kemandirian daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan penerimaan pembiayaan menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki dorongan untuk melakukan pengungkapan penuh melalui laporan keuangannya. Menurut teori *signnalling*, pemberian sinyal berupa informasi kinerja yang kurang baik dapat memengaruhi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dari pihak yang memberikan sinyal. Pemerintah daerah mungkin

menganggap pengungkapan penuh melalui laporan keuangan dapat mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanifa (2021) menyatakan bahwa dari segi efektivitas PAD dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu rata-rata sebesar 119% yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerahnya tergolong sudah sangat efektif. Kinerja pemerintah daerah yang cukup baik dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) ini kemungkinan menyebabkan pemerintah daerah menganggap bahwa sudah cukup menunjukkan kinerjanya secara keseluruhan melalui total pendapatan daerahnya sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan pengungkapan secara penuh melalui LKPD dan hanya melakukan pengungkapan seadanya saja.

Hasil dari penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ariani (2022) dan Maulana dan Handayani (2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ariani (2022) yang meneliti tingkat pengungkapan LKPD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020 menunjukkan hasil bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil serupa juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Handayani (2015) yang dilakukan pada LKPD Kabupaten/Kota di pulau Jawa tahun 2013 yang menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh

terhadap tingkat pengungkapan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hiola dan Harun (2021) yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018-2020.

4.5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data dari pengujian yang telah dilakukan untuk variabel indeks Pembangunan manusia didapatkan hasil bahwa menurut koefisien regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia (X_2) didapatkan nilai positif sebesar 0,249. Nilai koefisien ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan sebanyak 1 satuan pada indeks pembangunan manusia maka akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,249 pada tingkat pengungkapan LKPD dengan asumsi variabel independent lainnya konstan. Hubungan pengaruh antara indeks pembangunan manusia (X_2) terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Y) memiliki hubungan pengaruh yang positif.

Berdasarkan hasil regresi untuk uji t atau uji parsial, didapatkan nilai t_{hitung} yang dihasilkan untuk variabel indeks pembangunan manusia adalah 0,974, t_{tabel} yaitu sebesar 1,998, α sebesar 0,05, p-value uji t yang dihasilkan sebesar 0,334. Karena nilai $t_{hitung} = 0,974 < t_{tabel} = 1,998$ dan p-value uji t = 0,334 > 0,05, maka dapat diartikan bahwa **H_2 ditolak**

sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian Pembangunan manusia disuatu daerah. Peningkatan kualitas pada indikator dari IPM seperti tingkat pengetahuan dan standar hidup layak akan mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan kebutuhan informasi kinerja dari pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah akan terdorong untuk melakukan pengungkapan. Namun tingginya IPM di Sulawesi Tenggara tidak diiringi dengan meningkatnya pengungkapan pada LKPD. Berdasarkan hasil analisa data untuk variabel IPM di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil bahwa rata-rata nilai IPM untuk Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara adalah sebesar 68,9387. Nilai ini menurut BPS (2021) sudah masuk dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$) artinya tingkat pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik walaupun belum maksimal.

Tingginya nilai IPM kemungkinan tidak diiringi dengan keaktifan dan kesadaran dari masyarakat sebagai pihak prinsipal dalam mengawasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan atas informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan maupun ketercapaian program. Selain itu, beberapa pemerintah daerah

menggunakan media *website* resmi pemerintahan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat lebih spesifik berkaitan dengan program kerjanya ketimbang melakukan pengungkapan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa *website* resmi dari pemerintah daerah kabupaten Muna Barat, kota Bau-Bau, kota Kendari, kabupaten Kolaka, kota Konawe dan Kabupaten/Kota lainnya yang menunjukkan ketercapaian program kerja dan pembangunan daerahnya melalui berita-berita pada *website* resminya. Hal ini kemungkinan dilakukan karena pemerintah daerah menganggap tingkat pembangunan manusia di daerahnya sudah sampai pada tahap yang lebih familiar dengan penggunaan teknologi internet. Kemungkinan lainnya masyarakat sudah merasa informasi yang disampaikan melalui media lain seperti *website* resmi sudah cukup sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih melalui LKPD.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Misran (2021) pada LKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2015-2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Perubahan pada besarnya nilai dari indeks pembangunan manusia disuatu daerah tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan pada pengungkapan wajib LKPD. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Utami dan Sulardi (2019) dan penelitian dari Setyowati (2016) yang

menunjukkan hasil bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data dari pengujian yang telah dilakukan untuk variabel jumlah penduduk didapatkan hasil bahwa koefisien regresi variabel jumlah penduduk pada persamaan memiliki nilai positif sebesar 1,293. Nilai koefisien ini memiliki arti bahwa setiap terjadi peningkatan sebesar 1 satuan pada jumlah penduduk maka akan menyebabkan terjadi peningkatan sebesar 1,293 pada tingkat pengungkapan LKPD dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hubungan pengaruh antara jumlah penduduk (X_3) terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Y) memiliki hubungan pengaruh yang positif.

Berdasarkan hasil regresi untuk uji t atau uji parsial, didapatkan nilai t_{hitung} yang dihasilkan untuk variabel jumlah penduduk adalah 1,065, t_{tabel} yaitu sebesar 1,998, α sebesar 0,05, p-value uji t yang dihasilkan sebesar 0,290. Hasil ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,065 < t_{tabel} = 1,998$ dan p-value uji t = 0,290 > 0,05 yang dapat diartikan **H_3 ditolak** sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Jumlah penduduk seharusnya menunjukkan tingkat kompleksitas dan kebutuhan informasi dari masing-masing masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Kompleksitas dari masyarakat ini akan mendorong pemerintah daerah melakukan program yang sesuai dengan masyarakatnya, dimana hal ini menjadi salah satu alasan dari pemerintah daerah melakukan pengungkapan melalui LKPD. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak menyebabkan pengaruh peningkatan pada pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data jumlah penduduk BPS, rata-rata jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2021 adalah sebesar 2.693.284 jiwa. Jumlah ini jauh dibawah rata-rata jumlah penduduk provinsi di Indonesia pada tahun yang sama yang berkisar pada 7,7 – 8 juta jiwa per tahunnya. Sedangkan rata-rata jumlah penduduk pada per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara untuk tahun 2018 adalah 156.097 jiwa, tahun 2019 sebesar 159.102 jiwa, tahun 2020 sebesar 162.093 jiwa dan tahun 2021 sebesar 156.421 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota pada umumnya memang memiliki jumlah penduduk yang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Jumlah penduduk yang tidak begitu banyak ini kemungkinan menyebabkan pemerintah daerah kurang terdorong untuk melakukan peningkatan pada pengungkapan yang dilakukan. Jumlah penduduk yang sedikit menyebabkan kompleksitas dari masyarakatnya juga semakin

menurun. Kompleksitas masyarakat dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar ini menyebabkan program kerja yang dilakukan juga tidak begitu kompleks dan banyak sehingga pemerintah daerah mungkin tidak terdorong untuk meningkatkan pengungkapan mengenai informasi-informasi kinerjanya melalui LKPD. Selain itu penduduk dengan jumlah yang tidak begitu besar, pengelolaan daerahnya cenderung lebih mudah karena program-program pemerintah lebih mudah untuk diterapkan dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin (Astuti & Astika, 2016). Ketercapaian program-program pembangunan daerah pada Sulawesi Tenggara seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10% pada tahun 2021, penurunan pada tingkat pengangguran hingga 3,86%, penurunan tingkat kemiskinan dari 11,24% pada tahun 2019 menjadi 11% pada tahun 2020 dan beberapa capaian lainnya dari pemerintah daerah menjadi bukti nyata kinerja dari pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara (Moehiddin, 2022). Hal ini dapat menyebabkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak begitu mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan melalui LKPD.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naopal et al (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Naopal et al (2017) menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk periode 2014-2015. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya tidak menyebabkan pengaruh peningkatan pada tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahim et al (2020) dan Budiarto dan Indarti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4.5.4 Analisis Sebelum Masa Pandemi COVID-19 dan Ketika Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020 diketahui terjadi pandemi Covid-19 yang cukup sangat memengaruhi perekonomian dan aktifitas pemerintahan. Dari aspek ekonomi, mata pencaharian masyarakat cukup terdampak parah. Begitupun dengan pemerintahan yang banyak mengalokasikan dana pemerintahannya untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada saat pandemi juga berdampak pada aspek pendidikan, kualitas hidup, kesehatan hingga kehidupan sosial masyarakat (Rehman et al, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2018-2021. Seperti yang diketahui, tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan 2018 dan 2019 merupakan tahun sebelum terjadinya pandemi, oleh karena itu pada penelitian ini juga melakukan analisis atas pengaruh

dari Covid-19 terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menganalisis hasil olah data untuk tahun 2018-2019 dan 2020-2021.

Tabel 4.14 Hasil Uji t (tahun 2018-2019)

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t	Sig.
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	9,815	0,302	0,764
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0,132	0,515	0,610
Jumlah Penduduk (X3)	1,021	0,768	0,448

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Berdasarkan hasil regresi data periode tahun 2018-2019 sebelum terdampak Covid-19, didapatkan hasil seperti yang ditampilkan pada tabel 4.14. Pada tabel tersebut diketahui bahwa *p-value* uji t untuk ketiga variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel rasio kemandirian menunjukkan *p-value* uji t = 0,764 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh dari rasio kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2018-2019. Selanjutnya variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan *p-value* uji t = 0,610 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2018-2019. Terakhir variabel jumlah penduduk menunjukkan *p-value* uji t = 0,448 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2018-2019. Sehingga

dapat disimpulkan pada periode sebelum terjadinya Covid-19, variabel rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.15 Hasil Uji t (tahun 2020-2021)

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t	Sig.
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	-21,218	-0,424	0,675
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0,374	0,800	0,430
Jumlah Penduduk (X3)	1,530	0,798	0,431

Sumber: Hasil *output* SPSS, 2023

Uji t juga dilakukan pada periode tahun 2020 dan 2021 yang pada saat itu terdampak pandemi Covid-19. Hasil dari uji ini disajikan pada tabel 4.15 yang menunjukkan hasil bahwa untuk ketiga variabel independent yang diuji memiliki nilai *p-value* uji t untuk ketiga variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel rasio kemandirian menunjukkan *p-value* uji t = 0,675 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh dari rasio kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2020-2021. Selanjutnya variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan *p-value* uji t = 0,430 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2020-2021. Terakhir variabel jumlah penduduk menunjukkan *p-value* uji t = 0,431 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020-2021 yang merupakan tahun yang terdampak Covid-19.

Hasil pembahasan dari perbandingan hasil uji data tahun sebelum pandemi Covid-19 (2018-2019) dan saat terjadi pandemi Covid-19 (2020-2021) menunjukkan bahwa pada kedua periode tersebut tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Pada kedua tahun ini, rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil ini kemungkinan disebabkan karena pandemi Covid-19 lebih banyak memberikan dampak pada aspek kesehatan. Kemungkinan lainnya yaitu karena posisi Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak terletak dipusat perekonomian di Indonesia menyebabkan dampak Covid-19 di Sulawesi Tenggara tidak begitu dahsyat seperti Kabupaten/Kota di pulau Jawa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui mayoritas berasal dari pajak daerah walaupun cukup berpengaruh signifikan namun masih dapat ditanggulangi melalui kebijakan perpajakan untuk stabilitas ekonomi pada periode pandemi Covid-19 (Octavi et al, 2022). Variabel jumlah penduduk pada

Covid-19 walaupun diprediksi akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk, namun pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa pernyataan tersebut adalah mitos demografi dan tidak terbukti (Sukamdi et al, 2021). Dampak pandemi Covid-19 di Sulawesi Tenggara yang masih dapat dengan baik ditangani oleh pemerintah daerah setempat kemungkinan menyebabkan masyarakat tidak banyak memberikan dorongan untuk meningkatkan pengungkapan. Sehingga pada periode tahun sebelum Covid-19 (2018-2019) maupun pada saat terjadinya Covid-19 (2020-2021), pengaruh dari rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tidak jauh berbeda.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari hasil tersebut yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbasan yang didapatkan selama melakukan penelitian dan saran-saran yang dianjurkan kepada pengguna skripsi ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis olah data dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel rasio kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2018-2021. Tinggi rendahnya nilai rasio dari kemandirian suatu daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyebabkan rendah atau tingginya tingkat pengungkapan wajib.
2. Variabel indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2018-2021. Tingginya IPM di Sulawesi Tenggara tidak diiringi dengan meningkatnya pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2018-2021. Banyaknya jumlah penduduk tidak menyebabkan pengaruh peningkatan pada pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, diantaranya:

1. Terdapat banyak variabel yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diteliti pengaruhnya, namun dalam penelitian ini hanya dapat mengkaji variabel independent yang terdiri atas rasio kemandirian daerah, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk.
2. Pada beberapa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa halaman atau bagian yang hilang dari file laporan keuangan sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan data.

Berdasarkan pelaksanaan penelitian ini, berikut merupakan beberapa saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan variabel-variabel independent lainnya yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan LKDP. Variabel yang masih berpotensi untuk diteliti

yaitu seperti *intergovernmental revenue*, dan tingkat pendidikan terakhir kepala daerah.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengevaluasi kualitas dari pengungkapan wajib yang dilakukan melalui CALK dalam laporan keuangannya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan variabel rasio kemandirian daerah, indeks Pembangunan manusia dan jumlah penduduk untuk dikaji kembali pada pemerintah daerah provinsi lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2005). Peran akuntan dalam menegakkan prinsip good governance pada perusahaan di Indonesia. *Makalah disampaikan pada sidang senat guru besar Universitas Diponegoro dalam Rangka Pengusulun Jabatan Guru Besar.*
- Astuti, I. A. P., & Astika, I. B. P. (2016). ENGARUH JUMLAH PENDUDUK, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2416–2446.
- Ayyuuby, M. Al. (2021). *Analisis Tingkat Pengungkapan Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* [Thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baiman, S. (1990). Agency Research in Management Accounting : A Second Look. *Accounting, Organizations and Society*, 15(4), 341–371.
- BPK Sultra. (t.t.). *Profil Provinsi Sulawesi Tenggara*. sultra.bpk.go.id. Diambil 30 November 2023, dari <https://sultra.bpk.go.id/wilayah-pemeriksaan-provinsi-sulawesi-tenggara/>
- BPK Sultra. (2019). PENDAPATAN ASLI DAERAH SULTRA 2018 DAN PROYEKSI TAHUN 2019. *sultra.bpk.go.id*.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021* (hlm. 6–7). Badan Pusat Statistik.
- BPS Sulawesi Tenggara. (t.t.-a). *Indeks Pembangunan Manusia 2020-2022*. sultra.bps.go.id. Diambil 12 November 2023, dari <https://sultra.bps.go.id/indicator/26/271/1/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS Sulawesi Tenggara. (t.t.-b). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023*. sultra.bps.go.id. Diambil 12 November 2023, dari <https://sultra.bps.go.id/indicator/12/371/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- Brigham, & Houston. (1999). *Intermediate Financial Management*. The Dryden Press.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). APAKAH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH BERPENGARUH PADA PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH? RISET PADA KABUPATEN DI JAWA TENGAH. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19–31. www.jateng.bps.go.id

- CNN Indonesia. (2021, Juni 25). *10 Provinsi yang Bergantung Transfer Dana dari Pusat*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210625151555-532-659434/10-provinsi-yang-bergantung-transfer-dana-dari-pusat>
- Darma Putra, I. W. G. Y., & Ariyanto, D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (t.t.). *Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?* djpk.kemenkeu.go.id.
- Eggy. (2022, Desember 5). IPM Sultra naik 0,57 poin pada tahun 2022. *Antara Sultra*. IPM Sultra naik 0,57 poin pada tahun 2022
- Evans, J. H., & Patton, J. M. (1987). Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting. *Journal of Accounting Research*, 25, 130–158.
- Fauziah, F. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan: Teori Dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon.
- Febriani, U., & Harahap, J. P. R. S. M. S. A. (2021). *Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Girsang, H. A., & Yuyetta, E. N. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada LKPD kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1–11.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik (Keempat)*. Salemba Empat.

- HaloSultra.com. (2023, Mei 5). *Provinsi Sulawesi Tenggara: Profil dan Sejarah*. HaloSultra.com. <https://www.halosultra.com/halo-data/15226/provinsi-sulawesi-tenggara-profil-dan-sejarah/>
- Hamid, F. (2016). *PENGARUH KARAKTERISTIK DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGUNGKAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA* [Undergraduate Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 640–651. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1571>
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI GORONTALO. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021>
- Isni, A. R. (2018). *ANALISIS KUALITAS website PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN SE-SUMATERA BARAT*.
- Jensen, M. C., & Mecklinng, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial behaviour agency cost and ownership structur. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Keuangan, L., & Daerah, P. (t.t.). *ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN*.
- Kurniaty, H. (2021). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA PAMAIT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022. *Jurnal Pencerah Publik*, 10(1), 1–12.
- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2020). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* , 16, 237–248.
- Lane, J.-E. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches* (3 ed.). SAGE Publications Ltd .

- Lesmana, S. I. (2010). *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DI INDONESIA* [Tesis]. Universitas Sebelas Maret.
- Madelia, M., Rahayu, S., & Yudi. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH ANGGOTA LEGISLATIF DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2011-2015. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 3(1), 16–26.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. CV Andi Offset.
- Martani, D., & Lestiani, A. (2012). Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*, 3(1), 67–84.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Accounting Analysis Journal. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Moehiddin, I. Q. (2022, November 17). *Gubernur Ali Mazi Bacakan KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023*. sultraprov.
<https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/gubernur-ali-mazi-bacakan-kua-serta-prioritas-dan-plafon-anggaran- sementara-apbd-ta-2023>
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, TEMUAN AUDIT, DAN OPINI AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1).
- Naopal, F., Rhayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). .Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota yang terdapat di pulau Jawa tahun 2013). *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56–68.
- Nuswandari, C. (2009). *PENGUNGKAPAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF SIGNALLING THEORY*. 1(1), 48–57.
- Octavi, E. D., Tambunan, J. B., Andini, I. J., Amalia, K. P., Ibtisamah, N. P., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). PENGARUH PANDEMI COVID-19

TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA.
Dalam *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).

- Pemprov Sultra. (2023). *TENTANG SULAWESI TENGGARA*. sultraprov.
<https://www.sultraprov.go.id/tentang/sejarah>
- Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
(2010).
- Pramesti, S. P., & Misran, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Wajib LKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. *Jurnal
Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 611–623.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik
Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam
Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*.
- Raharjo, S. (2021a, Februari 19). *Cara Melakukan Analisis Regresi Multiplis
(Berganda) dengan SPSS*. SPSS Indonesia.
<https://www.spssindonesia.com/2014/02/analisis-regresi-multipes-dengan-spss.html>
- Raharjo, S. (2021b, Februari 19). *Cara Melakukan Uji t Parsial dalam Analisis
Regresi dengan SPSS*. SPSS Indonesia.
<https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.html>
- Raharjo, S. (2021c, Februari 19). *Cara Uji Normal Probability Plot dalam Model
Regresi dengan SPSS Sahid Raharjo Uji Asumsi Klasik*. SPSS Indonesia.
<https://www.spssindonesia.com/2017/03/normal-probability-plot.html>
- Raharjo, S. (2021d, Februari 19). *Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser
SPSS*. SPSS Indonesia. https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html#google_vignette
- Raharjo, S. (2021e, Februari 19). *Uji Multikolinearitas dengan Melihat Nilai
Tolerance dan VIF SPSS*. SPSS Indonesia.
<https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-multikolonieritas-dengan-melihat.html>
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local
Government Financial Statements in South Sulawesi. *Brawijaya
International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology
(BICMST 2020)*, 1–6. <http://orcid.org/0000-0003-4226-6520><http://orcid.org/0000-0002-8942-965X>

- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016, April). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III*.
- Rahma, S. (2022a, Mei 12). *EKSPOR SULTRA MENINGKAT 31 PERSEN PADA BULAN MARET*. biroekonomi.sultraprov.go.id.
<https://biroekonomi.sultraprov.go.id/berita/detail/ekspor-sultra-meningkat-31-persen-pada-bulan-maret>
- Rahma, S. (2022b, Mei 12). *EKSPOR SULTRA MENINGKAT 31 PERSEN PADA BULAN MARET*. Biro Administrasi Perekonomian Sulawesi Tenggara.
<https://biroekonomi.sultraprov.go.id/berita/detail/ekspor-sultra-meningkat-31-persen-pada-bulan-maret>
- Rehman, S., Nnabuike, U. E., Abbas, A., Rahman, A., Malik, U., Helmi Effendi, M., Hussain, K., Raza, M. A., & Helmi, M. (2022). A study on the Impacts of COVID-19 on health, Economy, Employment and Social Life of People in Indonesia. *International Quarterly Journal of Biological Sciences*. www.als-journal.com
- Said, R. (2001). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan sosial.
- Sari, R. M. (2016). RENCANA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH BASIS KONSEP PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PEMDA KABUPATEN TULUNGAGUNG). *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, 8(1), 1–7.
- Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Setiawan, W. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.

- Strom, K. (2002). *Parliamentary Democracy As Delegation and Accountability*.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sukamdi, Alfana, M. A. F., & Raharja, M. B. (2021). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN FERTILITAS DI INDONESIA. *Jurnal Geografi FIS UNP*, 10(1). <https://doi.org/10.24036/geografi/volx-issx/xxx>
- Susanti, R. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Go Public yang Listed Tahun 2005–2008)* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.
- Syafitri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Utami, S. R., & Sulardi. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 253–263. www.jab.fe.uns.ac.id
- Wardani, A. K., & Ariani, K. R. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018/2020). *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1.
- Wau, I., & Ratmono. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INTERNET FINANCIAL REPORTING OLEH PEMERINTAH DAERAH. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–12.
- Wayan, I., Yogiswara, G., Putra, D., & Ariyanto, D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14–32.
- Wulandari, N. A., & Sulardi. (2018). Pengaruh Karakteristik Daerah, Temuan, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Website Pemda di Indonesia). *AKUNTANSI DEWANTARA*, 2(1), 68–82.

LAMPIRAN 1

Tabel *Checklist* Kriteria Elemen Pengungkapan Wajib berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

NAMA KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

Elemen Pengungkapan Wajib Berdasarkan SAP		1	0
PSAP Nomor 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan			
1	Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.		
2	Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro		
3	Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target		
4	Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya		
5	Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.		
6	Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan		
7	Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.		
PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan			
8	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan		
9	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
10	Kondisi persediaan		
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi			
11	Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi		
12	Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen		

13	Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang		
14	Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut		
15	Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya		
16	Perubahan pos investasi		
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap			
17	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)		
18	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:		
19	Penambahan		
20	Pelepasan		
21	Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada		
22	Mutasi aset tetap lainnya		
	Informasi penyusutan, meliputi		
23	Nilai penyusutan		
24	Metode penyusutan yang digunakan		
25	Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
26	Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode		
27	Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap		
28	Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap		
29	Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi		
30	Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap		
	Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan		
30	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap:		
31	Tanggal efektif penilaian kembali		
32	Jika ada, nama penilai independen		
33	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti		
34	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap		
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan			
35	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya		
36	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya		
37	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan		
38	Uang muka kerja yang diberikan		
39	Retensi		
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban			

40	Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman		
41	Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya		
42	Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku		
43	Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo		
	Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:		
44	Pengurangan pinjaman		
45	Modifikasi persyaratan utang		
46	Pengurangan tingkat bunga pinjaman		
47	Pengunduran jatuh tempo pinjaman		
48	Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman		
49	Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan		
50	Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur		
	Biaya pinjaman		
51	Perlakuan biaya pinjaman		
52	Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan		
53	Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan		

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010

LAMPIRAN 2

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Jumlah item yang diungkapkan:

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Buton	28	27	27	26
2	Muna	28	29	30	28
3	Konawe	28	28	29	31
4	Kolaka	28	25	27	25
5	Konawe Selatan	29	30	29	29
6	Bombana	27	28	30	28
7	Wakatobi	30	29	32	31
8	Kolaka Utara	27	24	24	24
9	Buton Utara	26	28	27	26
10	Konawe Utara	26	27	29	28
11	Kolaka Timur	26	31	28	29
12	Konawe Kepulauan	27	26	26	27
13	Muna Barat	28	32	33	30
14	Buton Tengah	25	25	27	28
15	Buton Selatan	29	25	25	25
16	Kota Kendari	31	31	30	32
17	Kota Baubau	28	29	30	28

Tingkat Pengungkapan LKPD:

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Buton	52,83%	50,94%	50,94%	49,06%
2	Muna	52,83%	54,72%	56,60%	52,83%
3	Konawe	52,83%	52,83%	54,72%	58,49%
4	Kolaka	52,83%	47,17%	50,94%	47,17%
5	Konawe Selatan	54,72%	56,60%	54,72%	54,72%
6	Bombana	50,94%	52,83%	56,60%	52,83%
7	Wakatobi	56,60%	54,72%	60,38%	58,49%
8	Kolaka Utara	50,94%	45,28%	45,28%	45,28%
9	Buton Utara	49,06%	52,83%	50,94%	49,06%
10	Konawe Utara	49,06%	50,94%	54,72%	52,83%
11	Kolaka Timur	49,06%	58,49%	52,83%	54,72%
12	Konawe Kepulauan	50,94%	49,06%	49,06%	50,94%
13	Muna Barat	52,83%	60,38%	62,26%	56,60%
14	Buton Tengah	47,17%	47,17%	50,94%	52,83%
15	Buton Selatan	54,72%	47,17%	47,17%	47,17%
16	Kota Kendari	58,49%	58,49%	56,60%	60,38%
17	Kota Baubau	52,83%	54,72%	56,60%	52,83%

LAMPIRAN 3

Rasio Kemandirian Daerah Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018-2021

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Buton	0,03	0,04	0,04	0,04
2	Muna	0,04	0,04	0,05	0,06
3	Konawe	0,08	0,07	0,12	0,11
4	Kolaka	0,10	0,10	0,11	0,11
5	Konawe Selatan	0,04	0,05	0,06	0,06
6	Bombana	0,08	0,05	0,06	0,05
7	Wakatobi	0,04	0,04	0,04	0,05
8	Kolaka Utara	0,06	0,06	0,06	0,07
9	Buton Utara	0,02	0,04	0,03	0,03
10	Konawe Utara	0,02	0,02	0,03	0,03
11	Kolaka Timur	0,06	0,04	0,04	0,03
12	Konawe Kepulauan	0,03	0,02	0,02	0,02
13	Muna Barat	0,05	0,05	0,03	0,02
14	Buton Tengah	0,05	0,03	0,03	0,03
15	Buton Selatan	0,04	0,02	0,03	0,03
16	Kota Kendari	0,17	0,20	0,22	0,24
17	Kota Baubau	0,08	0,10	0,11	0,12

LAMPIRAN 4

Indeks Pembangunan Manusia Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018-2021

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Buton	65,08	65,67	65,98	66,32
2	Muna	68,47	68,97	69,02	69,17
3	Konawe	70,72	71,29	71,35	71,48
4	Kolaka	72,07	73,01	73,45	73,56
5	Konawe Selatan	67,51	67,88	68,20	68,58
6	Bombana	65,04	65,65	66,05	66,25
7	Wakatobi	68,52	68,99	69,48	69,87
8	Kolaka Utara	68,44	68,91	69,31	69,50
9	Buton Utara	67,13	67,68	67,87	68,08
10	Konawe Utara	68,50	69,22	69,86	70,23
11	Kolaka Timur	65,53	66,49	67,02	67,76
12	Konawe Kepulauan	64,36	65,05	65,41	65,73
13	Muna Barat	64,11	64,45	65,08	65,48
14	Buton Tengah	63,46	64,06	64,37	64,55
15	Buton Selatan	63,47	64,37	64,93	64,99
16	Kota Kendari	82,22	82,86	83,53	84,15
17	Kota Baubau	74,67	75,21	75,90	76,26

LAMPIRAN 5

Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2021 (jiwa)

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Buton	101.618	102.641	103.869	117.040
2	Muna	221.343	224.099	227.289	218.956
3	Konawe	249.010	254.695	260.411	261.116
4	Kolaka	256.827	261.664	266.069	241.366
5	Konawe Selatan	309.298	314.785	319.291	312.674
6	Bombana	180.035	184.570	189.269	151.910
7	Wakatobi	95.737	95.892	96.111	113.122
8	Kolaka Utara	147.863	150.831	153.669	139.234
9	Buton Utara	63.070	64.072	64.993	67.714
10	Konawe Utara	62.403	63.814	65.183	68.950
11	Kolaka Timur	130.860	133.324	135.569	120.966
12	Konawe Kepulauan	33.680	34.219	34.666	37.639
13	Muna Barat	80.619	81.624	82.785	84.777
14	Buton Tengah	92.165	93.091	94.207	116.599
15	Buton Selatan	79.979	80.784	81.752	95.472
16	Kota Kendari	381.628	392.830	404.232	350.267
17	Kota Baubau	167.519	171.802	176.224	161.354
	Sulawesi Tenggara	2.653.654	2.704.737	2.755.589	2.659.156

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RKD	68	,02	,24	,0609	,04629
IPM	68	63,46	84,15	68,9387	4,73865
JP	68	10,42	12,91	11,7875	,62947
TP	68	45,28	62,26	52,8022	4,02555
Valid N (listwise)	68				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,74868481
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,074
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

3. Uji Autokorelasi

Sebelum transformasi data menggunakan metode LAG:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,364 ^a	,133	,092	3,83554	2,510

a. Predictors: (Constant), JP, IPM, RKD

b. Dependent Variable: TP

Setelah transformasi data menggunakan metode LAG:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,466 ^a	,217	,167	3,70291	2,065

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, RKD, JP, IPM

b. Dependent Variable: TP

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,512	12,147		1,112	,270
	RKD	12,198	16,347	,230	,746	,458
	IPM	-,136	,144	-,262	-,942	,350
	JP	-,177	,683	-,045	-,259	,796

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,822	18,717		1,326	,190		
	RKD	-2,316	25,188	-,027	-,092	,927	,162	6,190
	IPM	,216	,222	,254	,974	,334	,199	5,037
	JP	1,121	1,053	,175	1,065	,291	,500	2,000

a. Dependent Variable: TP

6. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,822	18,717		1,326	,190
	RKD	-2,316	25,188	-,027	-,092	,927
	IPM	,216	,222	,254	,974	,334
	JP	1,121	1,053	,175	1,065	,291

a. Dependent Variable: TP

7. Koefisien Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,364 ^a	,133	,092	3,83554

a. Predictors: (Constant), JP, IPM, RKD

8. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	144,210	3	48,070	3,268	,027 ^b
	Residual	941,527	64	14,711		
	Total	1085,737	67			

a. Dependent Variable: TP

b. Predictors: (Constant), JP, IPM, RKD

9. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,822	18,717		1,326	,190
	RKD	-2,316	25,188	-,027	-,092	,927
	IPM	,216	,222	,254	,974	,334
	JP	1,121	1,053	,175	1,065	,291

a. Dependent Variable: TP

10. Uji t (Tahun 2018-2019)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,810	20,636		1,493	,146
	X1	9,815	32,460	,105	,302	,764
	X2	,132	,256	,168	,515	,610
	X3	1,021	1,330	,178	,768	,448

a. Dependent Variable: Y

11. Uji t (Tahun 2020-2021)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10,843	41,907		,259	,798
	X1	-21,218	50,066	-,256	-,424	,675
	X2	,374	,467	,413	,800	,430
	X3	1,503	1,883	,214	,798	,431

a. Dependent Variable: Y